

ABSTRAK

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris (*sociolegal research*) dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa mengakibatkan harta perkawinan yang dikuasai oleh suami tanpa persetujuan bekas isteri tidak dapat/ tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa persetujuan dari bekas isteri, karena dalam harta perkawinan tersebut masih terdapat hak isteri, selama belum adanya kekuatan hukum tetap. Kendalanya : menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Solusinya : perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Penyelesaian bisa lewat kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).Penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perceraian, Harta Bersama

ABSTRACT

Divorce is not only due to religious law and legislation, but also results in the extent to which the cultural influence of shame and control from the community, in societies where kinship is very strong, divorce is a difficult word issued but in societies that have weaknesses in their kinship system, divorce will easily occur.

The purpose of this research is to find out and explain the legal consequences of divorce on joint property in the religious court and its practice in the people of Cirebon Regency with the Decision of the Sumber Religious Court Number 1912 / Pdt.G / 2019 / PA.Sbr. To find out and explain the obstacles due to divorce law on joint property in the religious court and its practice in the people of Cirebon Regency with the Religious Court Decision Number 1912 / Pdt.G / 2019 / PA.Sbr and the solution

The method used by researchers is juridical empirical (sociolegal research) and the specifications in this study include descriptive analytical. As for the sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviews. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of justice and balance.

Based on the results of the research, the result of the marriage property that is controlled by the husband without the consent of the ex-wife cannot / is not allowed to sell or move the property without the consent of the ex-wife, because in the marital property there is still the wife's rights, as long as there is no permanent legal force. The obstacle: shows that there is still a lack of public understanding of the applicable legal provisions governing assets in marriage. Economic factors often become an obstacle for parties whose rights are violated, but are unable to pay for it, so they cannot be resolved in court and the case becomes pending. The object or object factor (gono-gini property) is built on land owned by the in-laws. Responsibility factor of the parties (husband and wife) who have debts to the Bank, buy movable objects in installments such as cars, motorbikes, and others. The solution: there is a need for legal counseling for the community and prospective brides who are getting married. The settlement can be done through the village head, but if it cannot be resolved through the village head, then through the court institution by attaching a statement of incapacity (prodeo). The settlement must be reduced by one of the parties selling the share equal to the value of the price of the goods sold. The settlement in this case is the collateralized object that is confiscated and auctioned off by the bank as the creditor that provides the debt facility.

Keywords: Legal Consequences, Divorce, Collective Property